

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, hal tersebut terlihat dari salah satu karakteristik negara yang berkembang yaitu upaya dalam meningkatkan perekonomian agar tetap stabil. Dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah melaksanakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kesejahteraan ini dianggap berhasil jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut sebagai tolak ukur pencapaian kesejahteraan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Tarigan (2005) pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi mengukur hasil dan perkembangan dari satu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Ernita, 2013).

Pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis perkembangan ekonomi suatu negara dan mengambil kebijakan yang tepat. Angka pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan seberapa besar pengaruh aktivitas ekonomi terhadap pendapatan masyarakat dalam jangka waktu

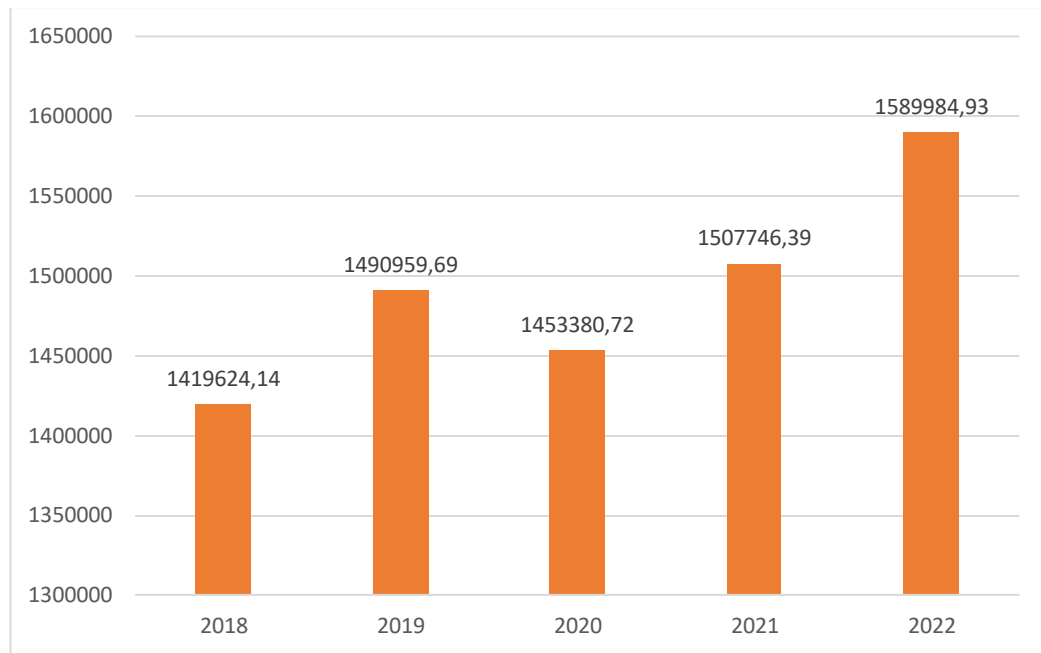
tertentu. Pada dasarnya kegiatan ekonomi merupakan suatu proses dimana faktor produksi digunakan untuk menghasilkan output, dan output tersebut diukur dengan perubahan produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Menurut Gustiana (2014) bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah cukup berperan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Setiap provinsi harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang memenuhi target sesuai dengan perencanaan ekonomi dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan.

Menurut Tarigan (2005) pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi mengukur hasil dan perkembangan dari suatu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilihat dari PDRB suatu negara.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010).

PDRB di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan dan penurunan berfluktuatif yang berarti bahwa belum optimalnya tingkat

kesejahteraan dan kualitas hidup manusia serta pemerataan di seluruh wilayah Jawa Barat. Pada tahun 2022 secara kumulatif pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa menurut BPS mencapai 5,31 persen, tertinggi ketiga setelah Pulau Maluku dan Papua sebesar 8,65 persen dan Pulau Sulawesi sebesar 7,05 persen. Namun secara kontribusi, pulau jawa mendominasi pertumbuhan di Indonesia. Pada tahun 2022 Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar 56,48 persen, yang diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,04 persen dan Pulau Kalimantan 9,23 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistika Jawa Barat

Gambar 1. 1 Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

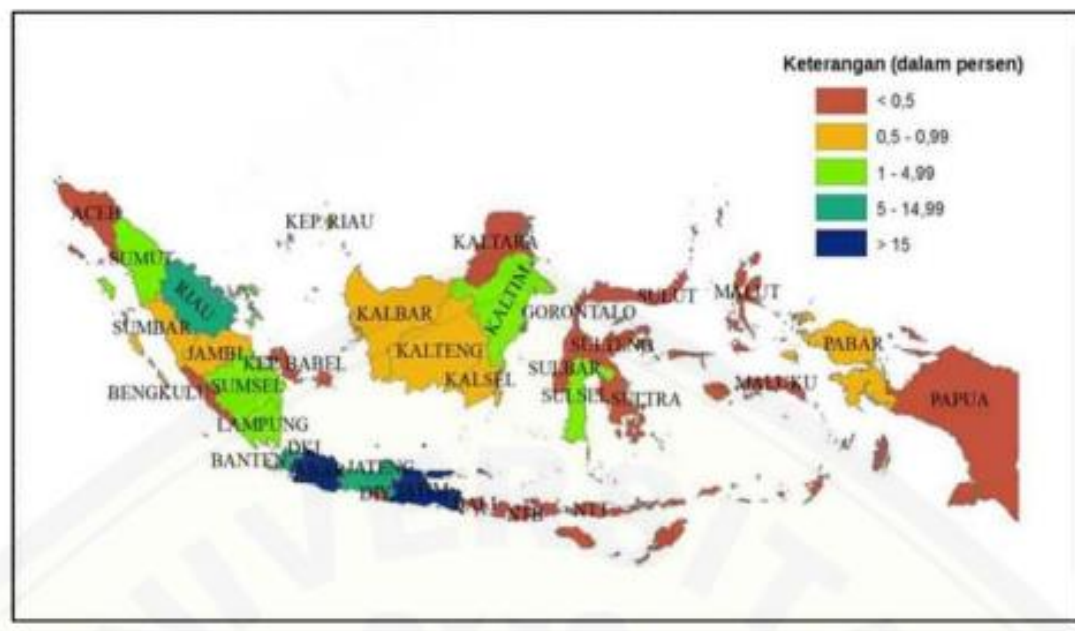
Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 sampai 2019 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami peningkatan. Akan tetapi, tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Kemudian tahun selanjutnya mengalami

peningkatan, naiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 disebabkan pemulihan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19, sehingga mendorong kinerja ekonomi di beberapa lapangan usaha di Provinsi Jawa Barat membaik.

Perkembangan ekonomi provinsi Jawa Barat tahun 2022 tumbuh sebesar 5,45 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,31 persen. Sektor yang paling banyak berkontribusi bagi perekonomian adalah sektor Industri Pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi. Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberhasilan pembangunan tersebut merupakan hasil agregat dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat pada periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dan penurunan harus lebih diperhatikan faktor-faktor penyebabnya agar suatu wilayah mampu mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dalam usaha mempercepat pembangunan ekonomi, pemerintah menggunakan strategi pergeseran sektor primer (pertanian) ke sektor non primer (industri) yang terjadi seiring dengan berjalannya zaman dan tuntutan perkembangan pembangunan disuatu negara. Proses pergeseran menjadi industri sejalan dengan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dua pengertian sekaligus. Pertama adalah tingkat hidup yang lebih maju. Kedua menjadikan taraf hidup lebih berkualitas, atau dapat dikatakan pembangunan industri merupakan suatu fungsi dan tujuan pokok kesejahteraan masyarakat, bukan kegiatan mandiri yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik belaka (Arsyad, 2010).

Persebaran wilayah industri di Indonesia belum merata sampai saat ini, akibatnya kesenjangan sosial dan kesejahteraan yang terjadi masih sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh persebaran industri yang merupakan salah satu sektor penunjang terbesar pembentukan Produk Domestik Regional Bruto masih terpusat di Pulau Jawa dan beberapa pulau di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan di kepulauan Indonesia bagian timur masih sangat rendah, berikut adalah peta sebaran industri di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistika

Gambar 1. 2 Peta Sebaran Industri Pengolahan di Indonesia

Pada gambar 1.2 Persebaran di Indonesia masih belum merata, kegiatan industri masih terpusat di Pulau Jawa, dengan dua titik konsentrasi industri besar, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat kemudian wilayah Jawa Timur, industri pada dua titik pemusatan ini memiliki Tingkat pengaruh terhadap total Produk Domestik Bruto mencapai 15 persen. Persebaran industri lain di luar Pulau Jawa

yang memiliki Tingkat pengaruh besar terhadap PDB berada di Provinsi Riau yang memiliki persentase sebesar 5-14,99 persen dari jumlah PDB. Kemudian persebaran industri di Indonesia bagian Timur yang meliputi wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Pulau Papua masih sangat rendah bahkan cenderung hampir tidak ada sama sekali, hal ini terlihat dari pengaruh jumlah industri terhadap total PDB yang hanya 0-0,5 persen.

Pada dasarnya Pembangunan industri merupakan fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan Masyarakat , bukan merupakan kegiatan yang mandiri untuk hanya sekedar mencapai kondisi fisik saja. Adanya industrialisasi suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti akan mengubah Tingkat hidup yang lebih maju dan bermutu. Pergeseran sektor primer ke sektor non-primer merupakan salah satu strategi untuk mempercepat Pembangunan industri.

Kegiatan perindustrian cenderung berlokasi di dalam dan di sekitaran kota. Kecenderungan konsentrasi ini didukung oleh penelitian Kuncoro (2002) dengan menggunakan indeks entropy untuk mengukur konsentrasi industri Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling dominan perannya dalam sektor industri dibanding pulau lain. Kesimpulan dari studi penelitiannya bahwa daerah-daerah industri utama di Pulau Jawa terletak di bagian Barat (Jabodetabek dan Sebagian Jawa Barat) serta bagian Timur (Surabaya Jawa Timur). Adapun daerah industri di Provinsi Jawa Tengah adalah Semarang, Kota Surakarta (Solo), Kabupaten Kudus, Serta Kabupaten Jepara.

Tabel 1. 1 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Persen)

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022					
Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,68	8,78	9,23	8,55	8,57
Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,25	1,11	1,16	1,15
Industri Pengolahan	42,19	41,6	41,12	41,8	42,24
Pengadaan Listrik dan Gas	0,56	0,52	0,48	0,51	0,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,1	0,11	0,1
Konstruksi	8,45	8,54	8,22	8,69	8,35
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Sepeda Motor	14,88	15,24	14,59	14,5	14,4
Transportasi dan Pergudangan	5,68	5,52	5,24	5,01	5,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,79	2,88	2,85	2,73	2,88
Informasi dan Komunikasi	2,87	2,87	3,93	3,96	3,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,71	2,8	2,94	2,88
Real Estate	1,06	1,08	1,13	1,2	1,17
Jasa Perusahaan	0,42	0,47	0,4	0,42	0,45
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	2,31	2,21	2,06	1,84
Jasa Pendidikan	3,02	3,21	3,62	3,51	3,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,79	0,78	0,81	0,79
Jasa Lainnya	2,09	2,15	2,16	2,06	2,15
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistika Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 1.1 sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan yang besarnya tiap tahun melebihi 40%. Pada tahun 2018 sektor industri pengolahan mencapai 42,19% dari total PDRB Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan mencapai 41,8% dan kemudian pada tahun 2022

mengalami peningkatan menjadi 42,24%. Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengubah barang mentah dengan cara mekanis, kimia ataupun dengan tangan menjadi barang jadi, dan atau barang yang memiliki nilai rendah menjadi barang yang tinggi nilainya, serta sifatnya berubah menjadi lebih dekat dengan konsumsi akhir (Hasibuan, 2018). Dibandingkan provinsi lain, Provinsi Jawa Barat masih menjadi pusat industri nasional karena mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat bahwa Jawa Barat memiliki 41 kawasan industri dari 136 kawasan industri di seluruh Indonesia.

Wilayah industri cenderung berlokasi di dalam dan di sekitar kota, karena industri cenderung beraglomerasi di wilayah yang mempunyai potensi dan kemampuan daerah yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Pengelompokan kegiatan industri juga terjadi karena setiap industri bisa mendapat manfaat dari kedekatan lokasi berbagai perusahaan industri. Akan tetapi, aglomerasi industri cenderung menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan antar wilayah. Ini terjadi karena wilayah yang banyak mempunyai industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang hanya mempunyai sedikit industri pengolahan (Nuryadin dan Sodik, 2007).

Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Aglomerasi dapat menghasilkan perbedaan spasial pada tingkat pendapatan. Menurut Sodik dan Iskandar (2007) menyatakan bahwa semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pula pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan regional pendapatan riil

akan selalu berbeda ketika aglomerasi terjadi dan aglomerasi memiliki dampak negatif terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan riil, di tingkat regional maupun agregat (Cerina & Mureddu, 2014). Daerah-daerah yang banyak memiliki industri lebih cepat berkembang karena lebih banyak memiliki akumulasi modal. Aglomerasi industri berkaitan dengan berbagai fasilitas pendukung seperti ketersediaan tenaga kerja dan transportasi yang mempengaruhi aglomerasi. Produsen akan memilih lokasi usaha dengan biaya yang relatif terjangkau guna mendorong efisiensi dan efektivitas produksi. Selain itu juga produsen akan memilih lokasi usaha dengan memperhatikan pasokan tenaga kerja di wilayah tersebut yang akhirnya akan menghasilkan kluster-kluster yang akan meningkatkan arus urbanisasi.

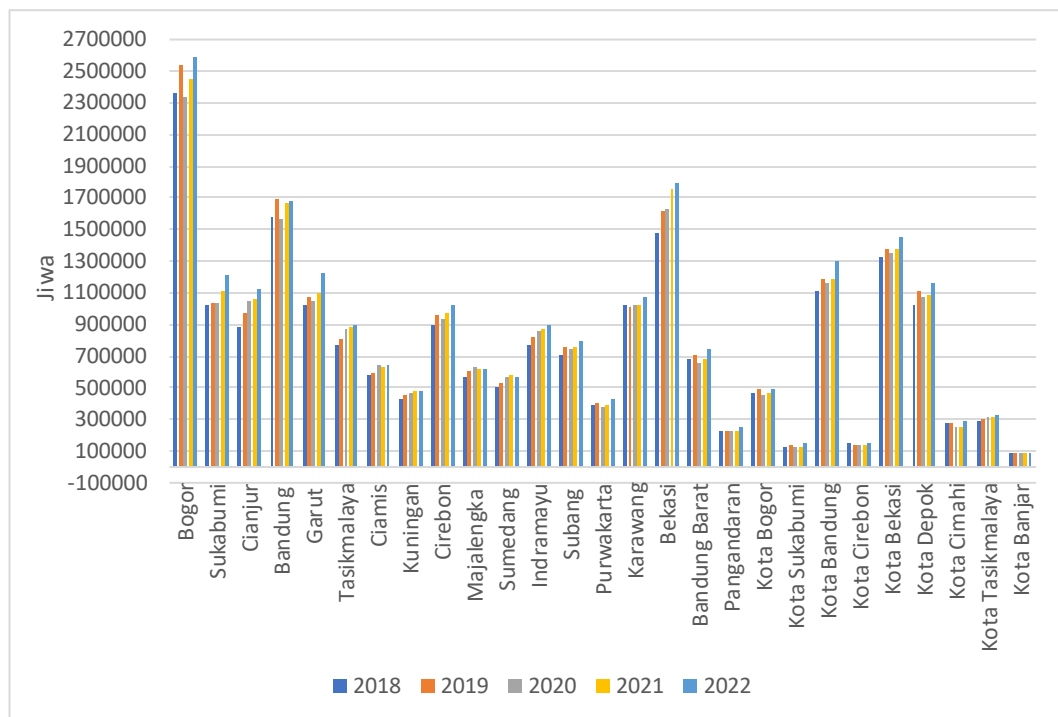
Aglomerasi akan terjadi jika sebuah aktivitas ekonomi dan penduduk melakukan pengelompokan atau terkonsentrasi secara spasial, pengelompokan ini diakibatkan oleh usaha para pelaku aktivitas ekonomi serta penduduk untuk melakukan penghemat, didukung oleh lokasi yang berdekatan (Matitaputty, 2010). Keuntungan dari aglomerasi industri berupa produktivitas dan pendapatan yang tinggi sehingga menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil. Pendapatan yang tinggi pada kegiatan industri akan meningkatkan arus urbanisasi yang mengakibatkan banyaknya pasokan tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari faktor produksi, yaitu modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labour*). Faktor produksi kapital bertujuan untuk menyediakan barang-barang modal (*capital good*) seperti mesin-mesin dan peralatannya sedangkan tenaga kerja menyediakan kemampuan (*skill*) untuk

mengelola daripada capital goods tadi yang secara bersama sama mampu merubah input menjadi output. Kombinasi kedua faktor produksi tersebut pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah (Herry Joko Rencono, 2010).

Pasar tenaga kerja menurut Mankiw (2006) mengatakan perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, akan tetapi permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) dimana permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada permintaan atas output yang dihasilkan. Suatu proses produksi agar menghasilkan barang dan jasa, tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Demikian hubungan antara produksi barang serta permintaan tenaga kerja menjadi faktor dalam menentukan tingkat upah. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia yang pada akhirnya mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah. Jika suatu daerah mengalami kenaikan produksi barang dan jasa maka permintaan akan tenaga kerja juga akan meningkat.

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Adapun faktor tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang meningkatkan pendapatan nasional. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sehingga apabila kuantitas tenaga kerja meningkat, maka hasil produktivitas akan meningkat pula (Todaro, 2000).



Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat

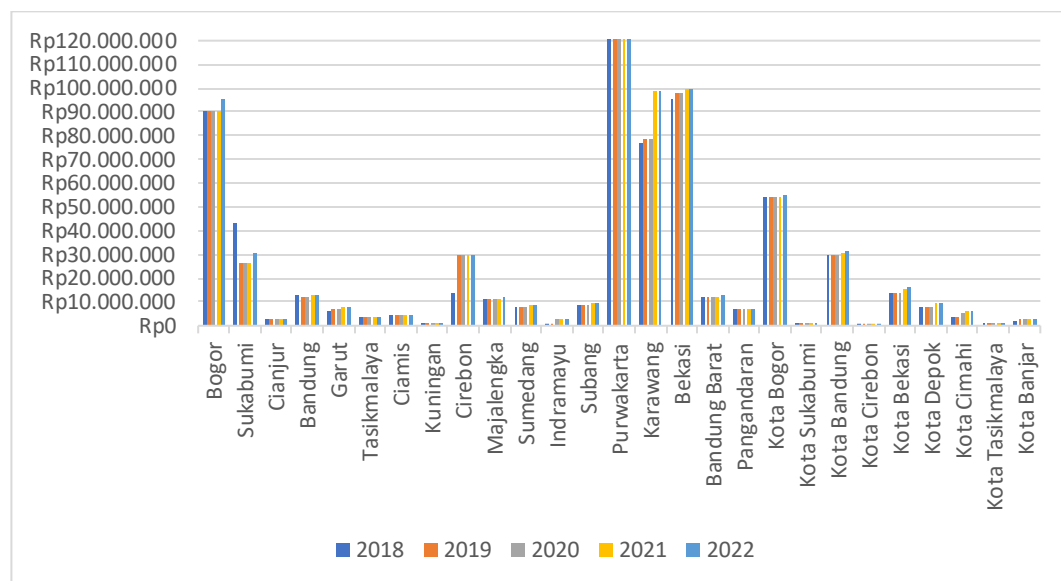
Gambar 1.3 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 (Jiwa)

Pada Gambar 1.3 Menunjukkan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja mencapai 20.779,888 jiwa, tahun 2019 mencapai 21.902,958 jiwa, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja menjadi 21.674,854 jiwa, hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 masih menjadi puncak adanya pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktifitas dan efisiensi sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga harus diarahkan agar sektor industri menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, budaya saing yang tinggi dan berkembang. Untuk mencapai hal ini sangat diperlukan sarana dan prsarana terutama dalam dukungan

dana yang memadai. Investasi mempunyai peran yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penguat pembangunan dan pertumbuhan nasional.

Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun Yasin, 2003).



Sumber: Open Data Jabar

Gambar 1. 4 Investasi Sektor Industri di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Pada gambar 1.5 diatas menunjukkan perkembangan investasi dari tahun 2018-2022 berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2022

penyerapan investasi di Kab/Kota selama 5 tahun terakhir menjadi yang paling tinggi Kab. Purwakarta tercatat menjadi salah satu daerah terbaik dalam soal pembinaan investasi pemodal asing dan dalam negeri di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2022 Kab. Purwakarta menyerap investasi pada sektor industri sebesar Rp121,90 triliun. Kemudian Kab. Bekasi menerima investasi terbanyak kedua sebesar Rp99,92 triliun. Selanjutnya disusul oleh Kab. Karawang dengan menyerap dana investasi sebesar Rp99,09 triliun. Sementara Kota Cirebon pada tahun 2022 menjadi wilayah penyerap dana investasi terendah sebesar Rp551,14 miliar, selanjutnya disusul oleh Kota Sukabumi sebesar Rp993,96 miliar. Kedua Kawasan tersebut mengalami kesulitan akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan pembatasan berbagai kegiatan Masyarakat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kota kedua wilayah tersebut akan semakin mempermudah investor datang untuk menanamkan modalnya.

Aglomerasi industri berpotensi memberikan keuntungan bagi pertumbuhan suatu wilayah, namun disisi lain membawa dampak negatif seperti urbanisasi yang mengakibatkan kepadatan penduduk di kota. Fokusnya adalah bagaimana pengaruh aglomerasi industri, tenaga kerja, dan investasi terhadap PDRB di Jawa Barat ini bisa menjadi landasan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut, dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh Aglomerasi Industri, Tenaga Kerja, dan

Investasi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013-2022”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Tenaga Kerja, dan Investasi Sektor Industri secara parsial terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tahun 2013-2022?
2. Bagaimana pengaruh Aglomerasi Industri, Tenaga Kerja, dan Investasi Sektor Industri secara bersama-sama terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tahun 2013-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi Industri, Tenaga Kerja, dan Investasi Sektor Industri secara parsial terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tahun 2013-2022?
2. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi Industri, Tenaga Kerja, dan Investasi Sektor Industri secara bersama-sama terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tahun 2013-2022?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Sebagai media pemahaman dalam pengembangan ilmu mengenai analisis Pengaruh Aglomerasi industri, Tenaga Kerja, dan Investasi Sektor Industri terhadap PDRB, hasil penelitian ini kemudian dijadikan sebagai perbandingan dan referensi yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah selama ini, penulis juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai Pengaruh Aglomerasi industri, Tenaga Kerja, dan Investasi Sektor Industri terhadap PDRB.

3. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah mengenai pengaruh variabel diatas khususnya kebijakan untuk meningkatkan PDRB di Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk peneliti selanjutnya agar hasil penelitian menjadi lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jawa Barat. Penulis melakukan penelitian menggunakan data sekunder yaitu aglomerasi industri, tenaga kerja, investasi sektor industri dan PDRB Jawa Barat. Sumber data diakses melalui website Badan Pusat Statistika (BPS) dan Open Data Jabar.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak diterbitkannya surat keputusan tentang pembimbing skripsi/tugas akhir pada semester ganjil tahun akademik 2023. Jadwal rencana penelitian digambarkan dengan menggunakan matriks sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	2023																2024																					
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
1	Pengajuan Outline dan Rekomendasi Pembimbing	■	■	■	■																																		
2	Proses Bimbingan Proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
3	Seminar Proposal																					■																	
4	Revisi Proposal Penelitian																					■	■	■															
5	Pengumpulan dan																									■	■	■	■										
6	Proses Bimbingan Skripsi																													■	■	■	■						
7	Sidang Skripsi																																■						